

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Basah, Sjahran., 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Efendi, Lutfi, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press, Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta.
- Kotijah, Siti, 2020, *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Lingkar Media, Bantul.
- Manan, Bagir, 1994, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ed. Ke-3 cet. Ke 1, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan-Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Jakarta Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan III, UI Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2009, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sushanty, Vera Rimbawani, 2020, *Hukum Perijinan*, Ubhara Press, Jakarta.

Suyudi, Aria Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Syarifudin, Ateng 1993, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Alumni, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Wahyuni, Sri dan Rifki Khoirudin, 2020, *Pengantar Manajemen Aset*, Nas Media Pustaka, Makassar.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, 2011, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang Kepailitan dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Internet

The Economic Times, What is 'Bankruptcy', [13/04/2016], <https://economictimes.indiatimes.com/definition/bankruptcy>, [28/01/23].

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019, KBBI Daring, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/izin>, [02/02/23].

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019, KBBI Daring, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/narasumber>, [02/02/23].

Jurnal

Abidin, Ratnasari Fajariya, et al., Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia), *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2017, Vol. 9, No.2, hlm. 315-364.

Basri, Hasan 2014, Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda, *Journal of US-China Public Administration*, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003, hlm. 831 – 838

Ersyta Fellista, 2018, “Pemaknaan Peluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Faktual” *Jurnal Justiciabelen* Vol.1, No.1.

Hadiwardoyo, Wibowo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid19”, *Journal of Business and Entrepreneurship*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 2, No. 2, April 2020, hlm. 83-92

Johnson, M. & Lee, R., The Economic Impact of Mining License Revocation, *Journal of Economic Perspectives*, November 2019, hlm. 173-192

Putriyanti Erma, Defiana dan Tata Wijayanta, Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, halaman 488.

Siti Aminah, Nababan, Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Model Problem Based Learning, *Jurnal Genta Mulia*, Vol. XI, No. 1, 2020, hlm. 6 – 12.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 216-226.

_____, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 22, Nomor 2, Februari 2010, hlm. 330-346.

_____, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Vol. 26, No. 1, Februari 2014, hlm. 1-13.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 208).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, Nomor: 54/Pdt.Sus-PKPU/2020
/Pn.Niaga SBy, Perihal Putusan Pailit PT Banjar Intan Mandiri, 17
Desember 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-
Lain/2022/PN Niaga Sby. Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

Wawancara

Nating, Imran, 2024, Penetapan Izin Usaha Pertambangan sebagai Aset Debitor
dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Going Concern PT Banjar Intan
Mandiri), *Wawancara*, Jakarta, 28 Mei.

Pujadi, Heneng, 2024, Penetapan Izin Usaha Pertambangan sebagai Aset Debitor
dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Going Concern PT Banjar Intan
Mandiri), *Wawancara*, Jakarta, 28 Mei.